

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Saat ini merupakan *era globalisasi* dimana zaman menjadi *modern* yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Implementasi aplikasi teknologi informasi dan komunikasi diberbagai aspek kehidupan masyarakat seperti dalam lingkungan politik, sosial, ekonomi, budaya, ideologi, politik, dan pertahanan keamanan telah merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Manfaat penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang dirasakan oleh beragam sektor seperti pendidikan, kesehatan, manufaktur, perbankan, keuangan, transportasi, *retail* dan distribusi, pariwisata, serta jasa-jasa lainnya. Hal ini menunjukkan bagaimana teknologi ini akan senantiasa berkembang dan diadopsi oleh seluruh individu dan komunitas. Salah satu komponen yang dapat menggunakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi ini yaitu pemerintah. Oleh karena itu pemerintah harus dapat meningkatnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat karena akan lebih efektif dan efisien, serta dapat mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*), melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang perkembangannya cepat dan canggih.

Dalam rangka merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* yaitu :

Ditujukan kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Walikota salah satunya adalah instruksi Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-Government* secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* sebagaimana ter-cantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

Ironisnya dalam hal ini perkembangan *e-Government* di Indonesia tidak menunjukkan kearah yang lebih baik, hal ini terlihat dengan adanya ranking *e-Government* di dunia yang terus menurun walaupun pada tahun 2012 ada peningkatan lebih baik, Berdasarkan *World E-Government Development Ranking*, peringkat Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 yakni peringkat ke 85 (2004), 96 (2005), 106 (2008), 109 (2010) sedangkan pada tahun 2012 Indonesia mengalami peningkatan yakni peringkat ke 97, (Sumber: *United Nation Public Administration Programme (UNPAN)* : 2012) dan pada penelitian lain kondisi *e-Government* di Indonesia yakni menurut *The 2012 Waseda University International e-Government Ranking released* menempati peringkat 34 dari 55 negara di dunia (Sumber: Waseda University : 2012). Hal ini memiliki pengertian bahwa Indonesia harus lebih meningkatkan kembali dalam implementasi *e-Government* tersebut, agar lebih baik dalam pelayanan publik.

**Bagus Husen Prawira Muhammad, 2012**

**Analisis Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Dalam Perspektif *E-Government* Pada Website Pemerintah Kota/Kabupaten Di Indonesia**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Proses atas reformasi birokrasi di Indonesia terus berjalan dan berusaha ditingkatkan oleh setiap elemen yang ada didalam pemerintahan tersebut. Hal ini ditunjukkan dalam peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat. Yang diharapkan dapat dirasakan secara efektif dan efisien. Salah satu peningkatan dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan adanya pelaksanaan *e-Government* di setiap pemerintahan, baik ranah pusat ataupun daerah. Untuk melihat pelaksanaan tersebut pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah melaksanakan *e-Government* tersebut. Dan pada tahun 2011 penghargaan pemanfaatan atas Teknologi dan Informasi Komunikasi ini diberikan kepada Provinsi Jawa Barat sebagai peringkat pertama dalam Pemingkatan *e-Government* Tahun 2011 untuk kategori Tingkat Provinsi yang diselenggarakan Kementerian Kominfo dengan nilai rata-rata 3,17 (Sumber: [www.layanan.pegi.go.id](http://www.layanan.pegi.go.id) : 2012).

Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), kini masyarakat Indonesia ‘seharusnya’ dapat meminta program, proses pengambilan kebijakan, dan keputusan Badan Publik beserta alasannya secara langsung atau melalui surat terkait kepentingan publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Akan tetapi, setelah 4 tahun berlalu sejak UU tersebut ditetapkan, banyak pihak sepakat bahwa penerapan UU KIP masih mengecewakan Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya tingkat pengungkapan atas informasi yang diberikan oleh

pemerintah tersebut. Maka sejalan dengan pengertian Informasi itu sendiri menurut UU

KIP adalah :

Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Adanya program *e-Government* dapat membuka peluang untuk membuka informasi yang dimiliki oleh suatu pemerintahan untuk mempermudah akses masyarakat terutama informasi yang ada, baik dalam informasi keuangan atau informasi non keuangan. Salah satu hal yang menjadi sorotan masyarakat terhadap suatu kinerja pemerintahan terutama dalam manajemen keuangan adalah transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya tingkat pengungkapan atas informasi yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Pada prinsipnya tingkat atas pengungkapan dalam laporan keuangan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami isi dan angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Menurut Sofyan (268:2007) “terdapat tiga tingkatan pengungkapan yaitu pengungkapan penuh, pengungkapan wajar, dan pengungkapan cukup”. Pengungkapan penuh mengacu pada seluruh informasi yang diberikan oleh perusahaan, baik informasi keuangan maupun informasi non keuangan. Pengungkapan penuh tidak hanya meliputi laporan keuangan tetapi juga mencakup informasi yang diberikan pada *management letter*, *company prospect* dan sebagainya. Pengungkapan cukup adalah pengungkapan yang diwajibkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Sementara

**Bagus Husen Prawira Muhammad, 2012**

**Analisis Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Dalam Perspektif *E-Government* Pada Website Pemerintah Kota/Kabupaten Di Indonesia**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

pengungkapan wajar adalah pengungkapan cukup ditambah dengan informasi lain yang dapat berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan seperti *contingencies*, *commitments* dan sebagainya.

Adanya akses masyarakat terhadap laporan keuangan suatu pemerintahan dapat meningkatkan kinerja atas pemerintah serta menuntut informasi yang relevan dan andal untuk digunakan, terutama dalam hal pengungkapan atas laporan keuangan. Serta hal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 tahun 2010 nomor 1 mengenai Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan paragraph 41 yang berbunyi :

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah: (a) Basis akuntansi; (b) Prinsip nilai historis; (c) Prinsip realisasi; (d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal; (e) Prinsip periodisitas; (f) Prinsip konsistensi; (g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan (h) Prinsip penyajian wajar.

Pada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, salah satunya adalah prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*) yakni Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau

Catatan atas Laporan Keuangan

Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan APBN/APBD setiap entitas baik pemerintah pusat, kementerian negara/lembaga, pemerintah daerah, dan satuan kerja di tingkat pemerintah pusat/daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah,

Komponen laporan keuangan pemerintah yakni terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); Neraca; Laporan Operasional (LO); Laporan Arus Kas (LAK); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Begitupula informasi non keuangan sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat apalagi para investor, wisatawan dan lainnya yang dapat meningkatkan ekonomi suatu daerah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Buku Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah yang diterbitkan pada bulan Agustus 2003 yakni :

Dimana situs web diharapkan mampu untuk menyajikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat , banyak dikunjungi dan diminati oleh banyak orang dan menjadi kebanggaan tersendiri oleh masyarakatnya sendiri dan kebanggaan Indonesia( 8 : 2010).

Oleh karena itu, penerapan *e-Government* menjadi sangat penting untuk dilaksanakan terutama dalam pengelolaan *website* di pemerintahan karena dapat memberikan informasi yang berguna, serta relevan bagi masyarakat.

Dalam implementasi informasi keuangan dan non keuangan tersebut, dapat tergambar pada fitur-fitur yang ada di *website* suatu pemerintahan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keberagaman fitur-fitur sesuai dengan kebutuhan

pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah tersebut, oleh karena itu Kementerian Komunikasi dan Informasi melaksanakan Pemingkatan *e-Government* (Pegi), dengan tujuan mendorong pemerintah daerah melaksanakan *e-Government* dengan baik, pada salah satu penilaian Pemingkatan *e-Government* (Pegi) yakni dimensi aplikasi dimana dimensi ini mengevaluasi terhadap ketersediaan dan tingkat penerapan dari berbagai aplikasi yang perlu dalam menjalankan fungsi *e-Government* yang sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah tersebut. Kelompok aplikasi yang di evaluasi tersebut meliputi “Kemasyarakatan, Administrasi dan Manajemen, Legislasi, Pembangunan, Keuangan, Kepegawaian, Kepemerintahan, Kewilayahan, Pelayanan”.

Dimensi aplikasi Pemingkatan *e-Government* (Pegi) diatas menunjukkan bahwa kriteria yang tersedia didalam suatu *website* pemerintahan harus mencakup 9 aplikasi tersebut yang terimplementasi dalam suatu fitur-fitur yang ada pada *website* tersebut. Sedangkan dalam penelitian terdahulu yakni pada *Financial Transparency on the web* (Herman, Budi dan Widya Silfianti 2011) menunjukkan beberapa fitur-fitur yang diteliti antara lain adalah,

Pada fitur non-keuangan terdiri dari 18 fitur yakni news, kontak Pemda, buku tamu, kegiatan Pemda, Visi dan Misi, Profil, Sejarah, Struktur, Promosi, *FAQ*, *E-procurement*, Fasilitas Pencarian, Tautan Link, Peta Daerah, Site Map, Forum, Pooling. Dan pada fitur keuangan terdiri dari 15 fitur yakni meliputi Informasi Penyelewengan Keuangan, Informasi Pajak dan Retribusi, Informasi Tugas Pembantu, Informasi Dana Konsentrasi, Dokumen Peraturan Daerah, Dokumen Peraturan Pemerintah, Inventarisasi Aset, *Opening Balance*, Laporan Keuangan BUMD, Berita Keuangan BUMD, Informasi Keuangan, Arus Kas, Realisasi Anggaran, APBD, Neraca Pemda.

**Bagus Husen Prawira Muhammad, 2012**

**Analisis Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Dalam Perspektif *E-Government* Pada *Website* Pemerintah Kota/Kabupaten Di Indonesia**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Kriteria fitur-fitur diatas menunjukkan bahwa informasi keuangan terdiri atas 15 fitur sedangkan informasi non keangan terdiri dari 18 fitur. Semakin tinggi atas keberadaan fitur tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan informasi oleh pemerintah Kota / Kabupaten, telah sesuai dengan kebutuhan bagi pengguna informasi tersebut. Menurut Undang-Undang No.26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, adalah,

Bahwa kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional dan dihubungkan dengan jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi serta menurut besarnya Kota/Kabupaten diklasifikasikan menjadi lima kategori yakni Megapolitan, Metropolitan, Besar, Sedang dan kecil.

Oleh karena itu klasifikasi Kota / Kabupaten dapat mempengaruhi jaringan yang terintegrasi atas ketersediaan informasi yang diungkapkan. Tetapi pada realitanya pengungkapan informasi, baik yang bersifat keuangan ataupun non keuangan sangat rendah terealisasikan hal tersebut terlihat dengan terbatasnya fitur-fitur pada *website* pemerintahan sehingga informasi yang diberikan oleh pemerintah terbatas. Dan sesuai dengan penelitian yang terdahulu yakni pada *Financial Transparency on the web* (Herman, Budi dan Widya Silfianti 2011) menjelaskan

Adanya temuan menarik yakni indikasi kesenjangan digital antara tingkat pemerintah daerah yang berda di Jawa dan luar Jawa yang relatif masih kurang memiliki informasi kurang dari situs web yang dimiliki pemerintahan tersebut.

Dari uraian diatas, maka penulis berharap dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **Analisis Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non**

## **Keuangan dalam Perspektif *E-Government* pada *Website* Pemerintahan Kota / Kabupaten di Indonesia.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* Pemerintahan Kota / Kabupaten di Indonesia.
2. Bagaimanakah implementasi fitur keuangan dan non keuangan pada *website* Pemerintahan Kota / Kabupaten di Indonesia.
3. Bagaimanakah hubungan peringkat indeks pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan Kota / Kabupaten di Indonesia dengan klasifikasi Kota / Kabupaten.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian adalah untuk menganalisis pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan dalam perspektif *e-Government* pada *website*

Pemerintahan Kota / Kabupaten di Indonesia dilihat dari pengungkapan fitur-fitur dan hubungan klasifikasi Kota / Kabupaten di Indonesia.

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan atas penelitian ini adalah.

1. Menggambarkan pengungkapan transparansi informasi keuangan dan non keuangan yang didasarkan pada *website* Kota / Kabupaten.
2. Menggambarkan ketersediaan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* Pemerintahan Kota / Kabupaten di Indonesia
3. Menggambarkan peringkat Kota / Kabupaten yang ada di Indonesia dalam pengungkapan informasi. Serta mengetahui hubungannya dengan klasifikasi Kota / Kabupaten di Indonesia.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan peneliti ini adalah sebagai berikut.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah atas kebijakan pemerintah, khususnya terkait dengan implementasi *e-Government*.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran serta informasi tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan dalam penerapan *e-Government* di pemerintahan Kota / Kabupaten di Indonesia dan mengetahui peringkat Kota / Kabupaten dalam penerapan *e-Government* di Indonesia serta hubungan peringkat tersebut dengan klasifikasi Kota / Kabupaten.